

ALTERNATIF KEBIJAKAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN PDB SUBSEKTOR PETERNAKAN DI INDONESIA

Nyak Ilham

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jalan A./ Yani No. 70, Bogor 16161*

ABSTRACT

Based on the growth trend of GDP and its multiplier effect, livestock sub sector is a potential resource for new source of agricultural growth sector. This paper is aimed: (i) to asses livestock commodities potential for new growth of livestock sub sector and (ii) to plan strategic development of commodities potential for new growth of the sub sector. The determination of commodity priority was based on its shares to the GDP of livestock sub sector, roles of the commodities on income distribution, and their market potentials. The results showed that the commodity priorities were beef cattle, broiler, and layer. The development strategy should include the role of not only institutions under the Directorate General of Livestock Services, but also other institutions under Ministry of Agriculture and other related institutions. The strategy should not only based on livestock technical aspects, but also institution and communication aspects.

Key words: *livestock, growth, strategy*

ABSTRAK

Berdasarkan pertumbuhan PDB dan efek pengganda maka subsektor peternakan berpotensi dijadikan sumber pertumbuhan baru pada sektor pertanian. Tulisan ini bertujuan untuk (i) mengkaji jenis komoditas peternakan yang dapat dijadikan sumber pertumbuhan subsektor peternakan, dan (ii) menyusun strategi pengembangan komoditas-komoditas sumber pertumbuhan. Penentuan komoditas prioritas didasarkan pada kontribusi PDB komoditas terhadap PDB peternakan, peran komoditas terhadap pemerataan pendapatan, dan potensi pasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa komoditas prioritas untuk dikembangkan adalah ternak sapi potong, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Strategi yang dilakukan tidak hanya melibatkan instansi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, tapi juga lingkup subsektor lain dalam Departemen Pertanian, dan lingkup luar Deptan. Strategi yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis peternakan, tapi juga aspek kelembagaan, dan aspek komunikasi.

Kata kunci: *peternakan, pertumbuhan, strategi*

PENDAHULUAN

Setelah terpuruk akibat krisis ekonomi, pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) subsektor peternakan bangkit kembali dengan rata-rata pertumbuhan PDB antara 2000-2006 sebesar 3,63 persen per tahun. Pada periode yang sama, angka tersebut di atas laju pertumbuhan sektor pertanian (2,66%/

tahun), subsektor tanaman pangan (2,05%/tahun), subsektor perkebunan (3,24%/tahun), dan subsektor kehutanan (-0,07%/tahun) (BPS, berbagai terbitan). Kemampuan subsektor peternakan tumbuh dengan cepat disebabkan sudah berkembangnya industri peternakan, terutama ayam ras dan sapi potong. Perilaku industri dua komoditas tersebut berpotensi dijadikan salah satu sumber pertumbuhan baru dalam sektor pertanian.

Menurut Priyarsono *et al.* (2005), subsektor peternakan mempunyai koefisien pengganda sebesar 7,23 untuk output bruto; 4,94 untuk tingkat keterkaitan; 2,14 untuk nilai tambah dan 1,79 untuk pendapatan rumah tangga. Maknanya, tiap 1 milyar rupiah diinjeksi ke subsektor ini akan meningkatkan output bruto bagi perekonomian Indonesia sebesar 7,23 milyar rupiah, meningkatkan pendapatan di sektor lainnya sebesar 4,94 milyar rupiah, memberikan nilai tambah sebesar 2,14 milyar rupiah dan meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 1,79 milyar rupiah. Fakta itu mengindikasikan subsektor peternakan berpotensi dijadikan sumber pertumbuhan baru pada sektor pertanian.

Untuk memicu pertumbuhan subsektor peternakan masih dijumpai beberapa permasalahan. Pada industri unggas penyediaan bibit dan pakan masih tergantung impor. Pada industri ruminansia besar, sumber bibit yang menhandalkan usaha peternakan rakyat tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat, dan industri pakannya belum diusahakan dengan baik. Terbatasnya infrastruktur dan perdagangan ternak hidup tanpa kendali berpeluang penyebaran penyakit dan tidak terjaminnya kualitas dan keamanan produk. Dari sisi konsumsi, terjadi senjang penawaran dan permintaan, khususnya pada daging sapi sehingga harus dipenuhi dari impor. Di sisi lain, kapasitas produksi ayam ras masih mampu ditingkatkan lagi, hanya permintaannya sangat tergantung pada daya beli konsumen, kualitas gizi dan keamanan produk. Semuanya itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan. Untuk mengatasi permasalahan diperlukan strategi pembangunan yang fokus pada sasaran yang tepat. Fokus sasaran meliputi komoditas dan wilayah yang akan dikembangkan.

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi, tulisan ini akan mengidentifikasi jenis komoditas peternakan prioritas yang dapat dijadikan sumber pertumbuhan subsektor peternakan dan daerah mana yang diprioritaskan sebagai pusat pengembangannya; dan menyusun strategi pengembangan komoditas-komoditas sumber pertumbuhan subsektor peternakan. Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah tersusunnya strategi pengembangan komoditas terpilih sebagai acuan dalam merumuskan strategi pertumbuhan subsektor peternakan.

DASAR PERTIMBANGAN

Penentuan Komoditas Prioritas

Untuk mengefektifkan upaya peningkatan pertumbuhan diperlukan kegiatan yang fokus. Dalam hal ini, difokuskan pada komoditas peternakan yang

diprioritaskan. Penentuan komoditas prioritas didasarkan pada kontribusi PDB komoditas terhadap PDB peternakan, pengaruh komoditas tersebut terhadap upaya pemerataan pendapatan, dan potensi pasar.

Dua pendekatan untuk menentukan PDB, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan (Lipsey *et al.*, 1993). Berdasarkan ketersediaan data dan kemudahannya maka dalam menentukan PDB komoditas, dilakukan dengan pendekatan produksi yaitu mengalikan produksi komoditas dengan harga komoditas. Untuk menghindari pengaruh inflasi digunakan harga konstan, sehingga nilai PDB komoditas yang diperoleh merupakan nilai riil.

Penentuan Lokasi Prioritas

Dengan sumberdaya yang terbatas, penggunaannya tidak dibagi merata pada semua wilayah. Tiap wilayah mempunyai potensi berbeda sehingga tidak efektif jika pembangunan peternakan dilakukan merata pada semua wilayah. Penentuan lokasi prioritas menggunakan pendekatan kondisi eksisting. Karena daerah-daerah sentra produksi yang ada sesuai dengan kondisi biofisik dan sosial ekonomi yang mendukungnya dan potensial untuk dikembangkan. Kajian ini juga mencoba melihat daerah sentra produksi baru yang didukung potensi sumberdaya dan pasar.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan

Dua peubah utama yang mempengaruhi pertumbuhan subsektor peternakan melalui peubah produksi (Q) dan harga (P). Karena peubah harga cenderung mengikuti mekanisme pasar maka sulit dikendalikan. Karena itu dalam memicu pertumbuhan subsektor peternakan lebih difokuskan pada peubah produksi. Dalam konsep dasar pembangunan peternakan tiga faktor utama yang menentukan produksi adalah bibit, pakan dan manajemen usaha. Ketiga faktor ini akan dibahas pada uraian lebih lanjut.

PENENTUAN KOMODITAS PETERNAKAN

Kontribusi PDB Peternakan

Pada periode 1993-2002 kontribusi masing-masing komoditas terhadap pembentukan PDB subsektor peternakan tidak banyak bergeser (Tabel 1). Jika dilihat kondisi tahun 2002, kontribusi PDB tertinggi diciptakan oleh daging unggas yaitu 36,5 persen, kemudian diikuti sapi 19,93 persen, telur ayam ras 14,53 persen dan produk lain 6,9 persen. Produk lain ini mencakup produk susu, puyuh dan ternak lainnya.

Tabel 1. Pangsa PDB Beberapa Komoditas Peternakan¹⁾ terhadap PDB Subsektor Peternakan atas Dasar Harga Konstan 1993 (%)

Tahun	Daging					Jumlah	Telur		Total
	Sapi	Kambing	Domba	Babi	Unggas		Ras Petelur	Total Telur	
1993	27,92	5,37	3,02	6,83	30,81	73,96	11,21	19,83	93,79
1994	24,62	3,91	2,92	6,72	32,92	71,10	12,14	21,72	92,82
1995	21,77	3,65	2,51	6,21	33,42	67,56	12,49	22,11	89,67
1996	23,15	3,72	2,44	6,32	34,54	70,17	13,08	22,31	92,48
1997	23,65	4,10	2,61	4,91	32,86	68,13	12,66	21,93	90,06
1998	25,95	3,22	2,40	5,04	25,88	62,50	7,97	17,95	80,45
1999	21,73	2,96	2,13	4,82	23,96	55,60	9,85	20,16	75,76
2000	22,13	2,74	2,04	5,29	29,12	61,31	12,83	21,98	83,29
2001	21,11	2,84	2,61	4,99	31,48	63,04	13,13	22,90	85,94
2002	19,93	3,29	3,88	4,97	36,46	68,53	14,53	24,53	93,06

1) belum termasuk susu

Sumber: Statistik peternakan berbagai tahun (diolah)

Jumlah Rumah Tangga Peternak

Untuk melihat peranan subsektor peternakan dalam perekonomian adalah kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari jumlah rumah tangga peternak (RTP). Secara tidak langsung informasi ini menunjukkan peranan usaha ternak sebagai sumber pendapatan rumah tangga.

Menurut hasil Sensus Pertanian (BPS, 2004a), terjadi peningkatan RTP dari 4,50 juta pada tahun 1983 menjadi 5,62 juta pada 1993 dan menjadi 5,63 juta pada tahun 2003. Peningkatan sebesar 1,1 juta RTP selama 10 tahun pertama menunjukkan bahwa subsektor peternakan memiliki peranan yang signifikan dan cenderung meningkat dalam menciptakan lapangan kerja dan sebagai pendapatan rumah tangga. Namun peningkatan tersebut makin menurun pada sepuluh tahun kedua. Penurunan ini selain tidak memasukkan NAD dalam data, memang ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan RTP.

Berdasarkan jumlah RTP masing-masing komoditas, Sensus Pertanian 1993 menunjukkan bahwa usaha sapi potong melibatkan paling banyak RTP yaitu 2,95 juta. Kemudian diikuti RTP babi 0,60 juta, RTP ayam buras 0,48 juta dan RTP kambing 0,39 juta. Sensus Pertanian 2003 hanya tiga jenis ternak yang didata. Dari 5,63 juta ternak, RTP sapi potong 2,57 juta (42,5%), kambing 0,60 juta (10,6%), ayam buras 0,85 juta (15,1%), dan ternak lainnya 1,61 juta (28,6%) (BPS, 2005a). Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2. Indikator ini menunjukkan pentingnya peran usaha peternakan sapi untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan.

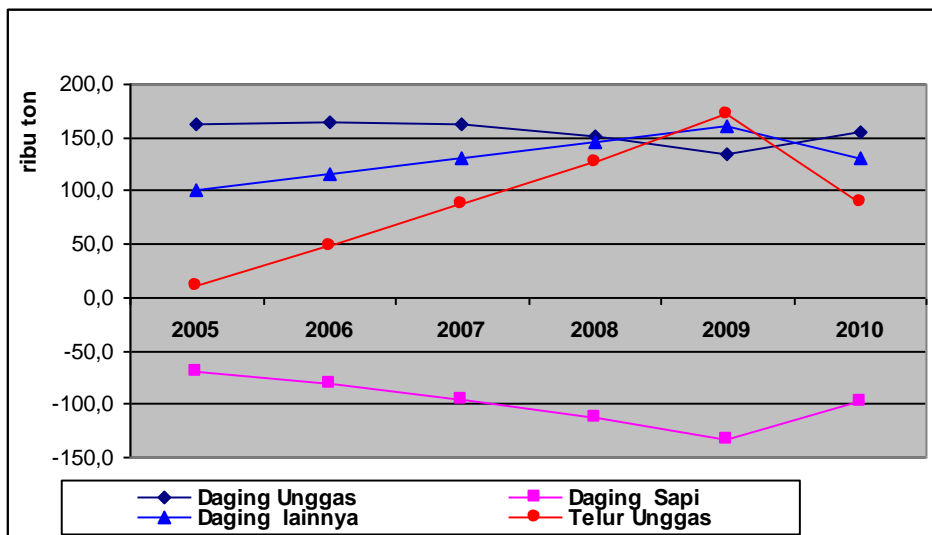
Tabel 2. Jumlah RTP menurut Jenis Ternak di Indonesia, 1983, 1993, dan 2003

No	Ternak	Jumlah RTP		
		1983	1993	2003 ^{*)}
1.	Sapi Potong	2.397.698	2.957.397	2.568.825
2.	Sapi Perah	53.337	99.095	-
3.	Kambing	529.025	394.128	597.832
4.	Domba	70.913	185.033	-
5.	Babi	462.532	602.285	-
6.	Ayam Buras	414.547	478.315	851.920
7.	Ayam Ras	93.002	84.070	-
8.	Ternak Lainnya	-	-	1.609.322

Sumber: Ditjenak, 2005; ^{*)} dan BPS, 2005

Potensi Pasar

Beberapa studi menunjukkan bahwa potensi produksi daging sapi domestik berada di bawah permintaannya, sebaliknya untuk produk unggas, dan daging lainnya. Sebagai gambaran Bappenas (2004) memproyeksikan bahwa selama lima tahun ke depan Indonesia mengalami surplus produksi daging unggas, daging non unggas, daging non sapi dan telur, sedangkan untuk daging sapi masih defisit. Gambarnya dapat dilihat pada Gambar 1. Kondisi itu dapat dijadikan gambaran potensi pasar masing-masing komoditas.



Gambar 1. Proyeksi Senjang Konsumsi dengan Produksi Daging dan Telur di Indonesia, 2005-2010

Berdasarkan tiga indikator utama yang menentukan PDB subsektor peternakan dan sekaligus menciptakan pemerataan yaitu pangsa PDB, jumlah RTP, dan potensi pasar hasil analisis dari Tabel 1, Tabel 2 dan Gambar 1, maka dengan asumsi semua kriteria berbobot sama, komoditas peternakan yang perlu mendapat prioritas adalah sapi potong dan ayam (Tabel 3).

Tabel 3. Urutan Prioritas Komoditas Peternakan Berdasarkan Beberapa Kriteria

No	Komoditas	Kriteria			
		Pangsa PDB	RTP	Potensi Pasar	Jumlah
1.	Sapi Potong	1	1	1	3
2.	Kambing	6	3	4	13
3.	Domba	5	4	3	12
4.	Babi	4	2	5	11
5.	Ayam Broiler	3	5	2	10
6.	Ayam Petelur	2	6	2	10

Sumber : Hasil olahan

PENENTUAN LOKASI PETERNAKAN

Sapi Potong

Daerah sentra produksi dapat dilihat dari jumlah populasi ternak daerah tersebut. Karena perkembangan ternak di suatu daerah menggambarkan kemampuan sumberdaya di daerah tersebut, seperti ketersediaan pakan, keberadaan peternak dan sistem pendukung lainnya. Berdasarkan kriteria itu, daerah yang diprioritaskan untuk pengembangan sapi potong adalah Jatim, Jateng, Sulsel, NAD, Sumbar, Bali, NTT, NTB, Lampung, Sumsel, dan Sultra (Ditjenak, 2005).

Namun demikian ada juga daerah-daerah yang populasi ternaknya terbatas. Hal ini dapat disebabkan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pakan, seperti pakan hijauan dan limbah agroindustri untuk industri ternak. Disamping itu tingginya konsumsi daerah tersebut menyebabkan banyak terjadi pemotongan ternak. Daerah seperti ini merupakan daerah potensial untuk dikembangkan sebagai sentra produksi sapi potong, seperti Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Ayam Ras

Untuk lebih memudahkan aksesibilitas konsumen terhadap produk ayam ras maka pengembangannya dapat dilakukan pada berbagai daerah, tidak hanya terbatas di Jawa. Untuk itu sarana pendukung industri ayam ras juga perlu dikembangkan di daerah luar Jawa. Daerah-daerah pengembangan ayam ras pedaging adalah: Jabar, Jatim, Jateng, Sumut, Banten, Lampung, Bali, DIY, dan

Sulsel. Untuk ayam ras petelur daerah pengembangannya adalah; Jatim, Sumut, Jabar, Jateng, Banten, Lampung, Sumsel, Sumbar, dan Sulsel (Ditjenak, 2005).

Selain itu ada juga daerah-daerah potensial yang baru berkembang untuk ayam ras pedaging yaitu: Kaltim, Riau, Sumsel, Kalbar, dan Kalsel, serta untuk ayam ras petelur yaitu: Bali, Kalsel, dan Kalbar. Pada daerah-daerah baru pengembangan ayam ras lebih disebabkan potensi pasarnya, sedangkan potensi pakannya masih kurang mendukung. Dengan demikian bahan baku pakan harus didatangkan dari Jawa atau Sulawesi. Pengembangan industri pakan skala besar ke daerah ini masih belum ekonomis karena skala ekonomi dan pendukung bahan baku yang belum memadai.

SITUASI SAAT INI

Sistem Pembibitan

Sapi Potong

Tingginya permintaan daging sapi domestik menyebabkan terkurasnya populasi dan menurunnya kualitas genetik sapi potong bahkan terpaksa memotong sapi betina produktif. Pemerintah tidak dapat hanya menghimbau atau melarang peternak menjual sapi betina produktifnya untuk dipotong, tetapi diperlukan upaya-upaya strategis untuk membangun pembibitan sapi potong nasional.

Saat ini pembibitan sapi potong masih mengandalkan usaha rakyat dan pemerintah, sedangkan swasta keterlibatannya sangat terbatas. Jika dihitung semua biaya tidak tunai, usaha pembibitan rakyat tidak memberikan keuntungan sebesar usaha penggemukan sapi (Hadi dan Ilham, 2002), sehingga usaha ini kurang diminati, kecuali pada daerah dimana tenaga kerja ternak masih diperlukan dan pada daerah yang tersedia padang penggembalaan. Usaha tersebut kurang diminati antara lain disebabkan usaha pembibitan: memiliki risiko lebih besar, perputaran modal lambat, tidak tersedia insentif kredit murah, status lahan padang penggembalaan tidak pasti, dan masa berlaku Hak Guna Usaha yang relatif singkat (25-30 tahun).

Upaya pembibitan sapi potong yang dilakukan pemerintah dapat dilihat dengan keberadaan institusi yang mendukung usaha tersebut (Tabel 4). Sejauh ini usaha pembibitan pemerintah tersebut masih belum signifikan mendukung industri sapi potong nasional. Padahal teknologi Inseminasi Buatan sudah 30 tahun lalu dikembangkan di Indonesia. Namun saat ini Indonesia masih mendatangkan sapi bibit dan sapi bakalan dari luar negeri.

Indonesia memiliki beberapa jenis sapi lokal, antara lain Sapi Aceh, Sapi Bali, Sapi Madura, Sapi SO/PO. Sapi lokal ini kurang respon terhadap perbaikan pemeliharaan dan pemberian pakan. Padahal usaha penggemukan membutuhkan sapi bakalan yang respon terhadap perbaikan pemeliharaan dan pemberian pakan.

Alternatifnya adalah menyilangkan sapi lokal dan sapi eks impor. Namun sapi bibit hasil persilangan tersebut fertilitas turunan keduanya mengalami penurunan, sehingga eksistensi sapi lokal harus tetap dipertahankan.

Tabel 4. Institusi Pemerintah yang Mendukung Sistem Pembibitan Sapi Potong, di Indonesia, Tahun 2005

No	Institusi	Jumlah (unit)
1.	Balai Pembibitan Ternak Unggul (Sapi)	3
2.	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak	2
3.	Balai Inseminasi Buatan (BIB)	2
4.	Balai Embryo Ternak	1
5.	Proyek Pengembangan Pembibitan Sapi Bali (P3 Bali)	1
6.	BIB Daerah	?
7.	UPT Pembibitan Daerah	?

Sumber: Ditjen Peternakan, 2005

Karena berat lahir dan pertambahan berat badan sapi persilangan lebih baik dari sapi lokal, maka permintaan terhadap sapi bakalan persilangan cukup tinggi, sehingga harganya menjadi mahal. Kasus di Sulawesi Selatan, sapi persilangan disukai peternak karena berat lahir dan pertambahan berat badannya lebih tinggi dari sapi lokal. Untuk sapi Bali berat lahir sekitar 16 kg sedangkan turunan induk Sapi Bali dengan semen Limosin mencapai sekitar 32 kg. Berkembangnya industri penggemukan sapi potong merupakan potensi pasar bagi pengembangan usaha pembibitan.

Ayam Ras

Masalah yang sering dihadapi peternak adalah harga DOC. Ketidaktepatan memprediksi permintaan produk menyebabkan tidak terjadinya keseimbangan antara DOC yang ditawarkan dengan yang diminta di pasar, akibatnya terjadi fluktuasi harga DOC yang dapat merembet pada fluktuasi harga produk daging ayam. Ini dapat dihindari jika produsen mendapat informasi berapa besar permintaan sehingga dapat diketahui berapa jumlah DOC yang harus diproduksi.

Menurut Ariyana yang dikutip Poultry Indonesia (2005b), dari 320 ribu ekor GPS (*Grand Parent Stock*) yang diimpor tahun 2003 mampu menghasilkan sekitar 13,5 juta ekor PS untuk tahun 2004 dan selanjutnya dapat dihasilkan 1.573 juta ekor DOC FS (*Final Stock*), belum termasuk yang berasal dari sumber lain. Padahal produksi DOC tahun 2004 hanya 1.040 juta ekor. Ini berarti produksi DOC FS masih di bawah kapasitas yang ada. Hal ini sudah berlangsung sejak lama (Tabel 5). Dengan meningkatnya daya beli setelah pemulihan ekonomi, produksi bibit cenderung mendekati kapasitas. Berarti dari sisi penawaran tidak ada masalah ketersediaan bibit. Jika pun terjadi fluktuasi harga hanya disebabkan pengaturan keseimbangan penawaran dan permintaan.

Tabel 5. Kapasitas dan Realisasi Pembibitan Ayam Ras di Indonesia, 1999-2003

(000 ekor)

Tahun	Pembibit		Kapasitas				Produksi	
	GPS	PS	PS		FS		FS	
			Broiler	Layer	Broiler	Layer	Broiler	Layer
1999	16	120	21.400	4.506	1.792.999	148.484	414.260	46.440
2000	14	0	12.357	3.316	1.418.966	228.602	541.168	58.568
2001	14	59	11.258	3.316	1.441.900	226.050	836.611	59.289
2002	15	70	11.866	3.316	1.582.600	235.800	886.561	53.462
2003	15	0	12.857	3.316	1.418.966	228.602	1.017.500	71.170

Sumber: Ditjenak 2004 dan 2005

Sampai saat ini belum terlihat potensi pengembangan bibit ayam domestik. Sementara itu industri unggas yang dikuasai usaha multinasional sudah berkembang pesat. Diprediksi, tahun 2020 pada umur 35 hari berat badan broiler sudah akan mencapai 2400 –2500 gram/ekor atau 400-500 gram lebih berat dari broiler yang berumur sama pada tahun 2005, *Feed Conversion Ratio* akan meningkat menjadi 1,4-1,5 atau 0,10-0,20 unit lebih rendah dari kondisi saat ini, pemeliharaan broiler jantan akan dipisahkan dengan yang betina (Poultry Indonesia, 2005a)

Dalam jangka panjang potensi yang dimiliki Indonesia adalah memanfaatkan ayam lokal dengan melakukan program *upgrading* ternak lokal yang respon terhadap perbaikan pemberian pakan dan pemeliharaan berdasarkan sumberdaya lokal. Ayam Arab merupakan salah satu kelompok Ayam Buras yang berpotensi untuk dikembangkan. Sebagai ayam petelur dengan pemeliharaan intensif produksi ayam Arab lebih tinggi dibandingkan ayam kampung (rata-rata 200 butir/ekor/tahun) atau sekitar 60 persen/ekor/tahun (Yusdja *et al.*, 2005)

Industri Pakan Ternak

Banyak penelitian yang berkaitan dengan aspek pakan, namun belum banyak hasilnya digunakan untuk kebutuhan industri pakan. Industri pakan ayam ras masih mengandalkan bahan baku konvensional yaitu, jagung, bungkil kedelai dan tepung tulang yang sebagian pengadaannya masih dari impor. Sementara itu, untuk pakan ruminansia belum ada industri pakan yang berkembang seperti industri pakan ayam ras.

Fakta menunjukkan bahwa negara produsen ayam broiler dunia bisa berkompetisi karena ditunjang oleh produksi jagung dalam negeri. Industri pakan nasional masih mengandalkan bahan baku impor, sehingga krisis moneter tahun 1997 menyebabkan 40 persen industri pakan ambruk (Tangenjaya *et al.*, 2003).

Sama seperti industri bibit, industri pakan juga masih dalam kondisi produksi di bawah kapasitas terpasang (Ditjenak, 2004 dan 2005). Pada tahun 2005 kapasitas terpasang pabrik pakan antara 10 – 11 juta ton, sedangkan produksi

riil baru mencapai 7 juta ton (Poultry Indonesia, 2005). Dengan demikian masih ada potensi produksi dalam upaya perluasan usaha ke daerah pengembangan baru.

Pengalaman krisis ekonomi tahun 1997 membuktikan bahwa industri unggas nasional, harus menggunakan input berbasis lokal. Jagung sebagai bahan baku utama sangat potensial dikembangkan di Indoensia. Disamping itu ada beberapa bahan baku pakan lokal potensial yang belum digunakan pada industri pakan, yaitu sorgum, ketela pohon, bungkil kelapa, bungkil sawit dan lumpur sawit serta tepung ikan. Bahan baku lokal tersebut belum dapat digunakan karena adanya keterbatasan yang berkaitan dengan nutrisi dan daya cerna, jumlah dan kontinuitas pasokan tidak terjamin, dan daya simpan terbatas. Sebaliknya jagung memiliki beberapa kelebihan sebagai bahan baku pakan, hanya harganya relatif lebih mahal.

Pada ternak ayam, puyuh, itik dan babi, jagung merupakan bahan utama pakan, sedangkan pada ternak ruminansia bahan utama pakan berasal dari hijauan. Penggunaan jagung akan meningkatkan harga pakan, sedangkan bahan tersebut dapat diganti oleh bahan lain, khususnya pada usaha penggemukan, yaitu dedak padi, ampas tahu, onggok, kulit kopi, bungkil kelapa, polar dan bungkil biji kapuk. Hijauan sebagai bahan utama pakan ternak ruminansia dapat bersumber dari: budidaya tanaman hijauan pakan ternak, padang penggembalaan umum, lahan tanaman perkebunan, limbah pertanian dan limbah agroindustri (Ilham, 1995).

Sumber pakan yang prospektif adalah limbah hasil pertanian seperti jerami padi, jerami jagung, jerami kacang-tanah, dan lain-lain; limbah hasil industri pertanian seperti bungkil inti sawit, lumpur sawit, bungkil biji kapuk, dedak kelapa, kulit biji kakao, dan lain-lain; dan lahan-lahan di bawah tanaman perkebunan. Pada beberapa daerah potensi tersebut belum dimanfaatkan seperti penggunaan jerami tanaman pangan dan pemanfaatan pelepah daun kelapa sawit dan banyak limbah yang dihasilkan secara lokal pada daerah potensi peternakan ruminansia. Namun demikian pemanfaatan bahan tersebut masih membutuhkan sentuhan teknologi baik untuk bentuk penyajiannya maupun formula kandungan zat gizinya.

Jagung dapat ditanam hampir diseluruh wilayah Indonesia. Pada lokasi sentra produksi, usahatani jagung memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman padi, kacang panjang dan kedelai yang ditanam di lahan sawah dengan nilai RCR 1,66 di Jawa Timur, 1,67 di Lampung, 2,03 di Sumatera Utara dan 2,13 di NTT (Djulin *et al.*, 2003). Dibandingkan dengan produk impor, jagung yang dihasilkan di Indonesia memiliki daya saing yang tinggi dengan nilai DRCR: 0,65 dan 0,58 di lahan sawah dan lahan kering Sumatera Utara; 0,78 dan 0,64 di lahan sawah dan lahan kering Lampung; dan 0,82 di lahan sawah Jawa Timur (Simatupang, 2003).

Bungkil kelapa sawit dan lumpur sawit serta daun pelepah kelapa sawit sangat potensial sebagai bahan baku industri pakan nasional (Karo-Karo, 2005). Dari volume minyak sawit yang dihasilkan dapat diperoleh 2 persen (setara

kering) lumpur sawit, namun karena serat kasarnya yang tinggi dan daya cernanya yang rendah penggunaannya dalam ransum unggas sangat terbatas. Penggunaannya membutuhkan pengolahan lebih lanjut, antara lain melalui proses fermentasi, sehingga mampu meningkatkan kualitasnya. Elisabeth dan Ginting (2003), pakan yang menggunakan 60 persen pelepah sawit, 18 persen lumpur sawit, 18 persen bungkil inti sawit, 4 persen dedak, 0,4 persen Urea dan 0,1 persen Garam merupakan formulasi pakan yang cukup baik untuk ternak sapi potong dengan pertambahan berat badan 0,58 kg/hari. Perikanan nasional berpotensi untuk memproduksi tepung ikan sebagai bahan baku pakan.

Dari sisi kelembagaan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang keberadaannya hampir di seluruh provinsi, berpotensi sebagai pusat kajian teknologi industri pakan (*complete feed*) yang aplikatif dan berbasis bahan baku lokal. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan berpotensi melakukan penelitian dan pengembangan nutrisi yang mendukung industri pakan dengan menggunakan bahan baku pakan lokal. Pengusaha *feedlot*ers berpotensi sebagai pengguna dan pengalih teknologi pakan serta pemasok pakan pada usaha peternakan sapi potong rakyat di sekitarnya.

Kesehatan Ternak dan Keamanan Produk

Ada tiga hal penting yang dapat ditimbulkan oleh adanya gangguan pada kesehatan ternak. *Pertama*, gangguan penyakit reproduksi yang menyebabkan kegagalan kelahiran. *Kedua*, gangguan kesehatan pada ternak yang menyebabkan menurunnya keuntungan atau kerugian atau bahkan kematian ternak. Dua penyebab penyakit tersebut memerlukan pengobatan sehingga meningkatkan biaya produksi. *Ketiga*, dampak psikologis pada konsumen akibat wabah penyakit ternak yang menyebabkan berkurangnya konsumsi produk ternak. Ketiganya menyebabkan kerugian ekonomi bagi pelaku industri peternakan.

Disamping itu, penggunaan obat-obatan dan *feed supplement* untuk ternak dan penanganan produk sejak di panen hingga di pasarkan dapat juga menyebabkan produk peternakan kurang aman untuk dikonsumsi. Bahkan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, saat ini banyak produk peternakan yang diperlakukan tidak wajar.

Jika permasalahan tersebut tidak ditangani, akhirnya produsen dan konsumen dirugikan. Hanya sekelompok kecil orang yang diuntungkan dengan cara tidak wajar. Keadaan ini tentunya akan mempengaruhi konsumsi terhadap produk peternakan. Terganggunya konsumsi juga akan mengganggu produksi yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan subsektor peternakan.

Kesehatan Ternak

Beberapa penyakit hewan yang merugikan di antaranya adalah *Anthrax*, *Avian Influenza* (AI), *Brucellosis*, *Newcastle Disease* dan *Septicchaemia*

Epizooticae. Dengan fasilitas dan sistem pengendalian dan pemberantasan yang memadai upaya pencegahan mewabahnya penyakit dapat dilakukan. AI yang mewabah di Indonesia selain memberikan dampak langsung melalui kematian yang tinggi, juga memberikan dampak tak langsung kepada peternak yang tidak terserang AI (Yusdja *et al.*, 2004). Wabah penyakit ini juga merugikan *stakeholders* industri perunggasan.

Berbagai penyakit tersebut sebenarnya dapat dikendalikan dan dicegah dengan melakukan pemberian pakan yang sehat dan bergizi serta melakukan aktivitas budidaya dengan pedoman-pedoman yang telah ditentukan. Demikian juga yang berkaitan dengan perdagangan ternak baik impor maupun antar pulau, jika sistem karantina berjalan sesuai standar, kecuali ada perdagangan ilegal, maka kasus penyebaran dan wabah penyakit dapat dicegah. Khusus untuk penyakit menular untuk mencegah timbulnya wabah di beberapa daerah endemik/enzootik adalah dengan vaksinasi masal pada ternak rentan secara reguler, terutama di daerah-daerah kantong penyakit.

Permasalahannya adalah apakah fasilitas pendukung dan sumberdaya manusia untuk mendukung upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit ternak tersebut sudah memadai. Sejak diberlakukannya Otda banyak institusi-institusi yang menangani masalah ini semakin melemah fungsinya. Hal tersebut antara lain dapat disebabkan oleh digabungkannya Dinas Peternakan di beberapa kabupaten/kota dan bahkan provinsi dengan Dinas Lingkup Pertanian lainnya. Dengan kondisi yang demikian kecenderungan yang terjadi program yang berkaitan dengan pengendalian dan pemberantasan penyakit semakin berkurang.

Masalah institusi lain adalah melemahnya peran PPL di lapangan menyebabkan sistem pelaporan dini adanya kasus-kasus penyakit tidak berfungsi baik. Kegiatan vaksinasi pada ternak yang seharusnya dilakukan secara reguler menjadi terabaikan. Keberadaan Poskeswan yang selama ini memang sudah sangat terbatas fungsinya pun semakin melemah.

Untuk memonitor, mengawasi dan memberantas penyakit ternak, Direktorat Jenderal Peternakan - Departemen Pertanian memiliki Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Di daerah, Direktorat ini memiliki Unit Pelaksana Teknis berupa Balai Besar Penyidikan dan Pengujian Veteriner (2 unit) dan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (5 unit). Laboratorium yang dimiliki Balai Besar dan Balai tersebut termasuk katagori Laboratorium Tipe-A. Karena keberadaannya terbatas hanya pada beberapa daerah maka untuk mendukung upaya pengendalian penyakit hewan pada sebagian besar Dinas Peternakan Provinsi terdapat laboratorium Tipe-B sebanyak 27 unit dan pada Dinas Peternakan Kabupaten/Kota terdapat Laboratorium Tipe-C sebanyak 88 unit dan Pos Kesehatan Hewan sebanyak 484 unit (Statistik Peternakan, 2004).

Dari 339 unit kabupaten/kota di Indonesia, keberadaan Poskeswan rata-rata hanya 1,42 unit per kabupaten/kota. Jika idealnya 2 – 3 kecamatan memiliki

satu unit Poskeswan (tiap kecamatan memiliki 1-2 Puskesmas/Puskesmas Pembantu), maka masih banyak lagi dibutuhkan keberadaan Pos Keswan yang harus didukung oleh tenaga veterinerian dan paraveterinerian serta peralatan dan sarana yang memadai.

Disamping sarana tersebut, pada tingkat nasional terdapat Balai Besar Penelitian Veteriner Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Badan Litbang Departemen Pertanian yang memiliki status Laboratorium tingkat Nasional. Selain memiliki laboratorium pengendalian penyakit, Departemen Pertanian juga memiliki Badan Karantina Pertanian dan seperangkat Unit Pelaksana Teknis di berbagai daerah.

Kasus flu burung dan *anthrax* akhir-akhir ini membuktikan bahwa pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan masalah kesehatan hewan dan veteriner karena akan terkait dengan masyarakat luas dan tidak lepas dengan instansi lain seperti: Departemen Kesehatan (zoonosis), Departemen Keamanan (bioterrorism) dan Perdagangan.

Potensi yang ada pada Pemerintah tersebut haruslah diberdayakan dengan memfungsikannya sesuai dengan Sistem Kesehatan Hewan Nasional dan Pedoman Pengendalian Penyakit Hewan Menular. Untuk mengoptimalkan fungsi pengendalian penyakit tersebut maka perlu diperhatikan dukungan keberadaan lembaga, kelengkapan tenaga, dukungan peraturan dan sarana pendukung serta biaya operasional di lapang.

Untuk menanggulangi wabah penyakit hewan secara umum sudah ada pedoman untuk masing-masing penyakit hewan. Bahkan dalam pedoman tersebut selain berisi pedoman pengendalian di lapang juga ada tambahan tentang pedoman penanganan di laboratorium. Khusus untuk penyakit flu burung sudah 9 strategi untuk mengendalikan dan memberantasnya.

Walaupun pemerintah sudah memiliki sarana untuk pengendalian penyakit, masih diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat produsen, pedagang hingga konsumen yang berkaitan dengan bidang peternakan. Kerjasama tersebut dapat berupa menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha; mengikuti aturan karantina dalam memasukkan ternak/hewan dan produk ternak/hewan dari luar daerah/luar negeri; dan melakukan sistem pengendalian penyakit di lingkungan usahanya.

Keamanan Produk Ternak

Produk hewani seperti daging dapat mengandung bibit penyakit yang berasal dari infeksi dan intoksikasi (keracunan) mikroorganisma saat ternak masih hidup; mengandung cemaran logam berat dan pestisida, serta kemungkinan pencemaran saat setelah pemotongan. Selain itu, saat ini banyak kita dengar penggunaan bahan pengawet atau cara-cara lain yang bertujuan mengejar keuntungan dengan tidak memperhatikan keamanan pangan bagi konsumen.

Efek kandungan bibit penyakit sifatnya akut dan dengan segera dapat dilihat, sedangkan efek bahan pengawet relatif lebih lama sehingga kurang mendapat perhatian konsumen. Khusus yang berkaitan dengan melanggar kaidah pangan halal sangat meresahkan sebagian besar konsumen.

Urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia tersebut merupakan masalah yang berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet). Fungsi Kesmavet (Anonimous, 2004) antara lain: (1) untuk melindungi konsumen dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat menggunakan baik untuk dipakai atau dimakan bahan makanan yang berasal dari hewan; (2) melindungi dan menjamin ketenteraman bathin masyarakat dari kemungkinan penularan zoonosa yang sumbernya berasal dari hewan; dan (3) melindungi petani/peternak dari kerugian-kerugian sebagai akibat penurunan nilai dan kualitas bahan makanan asal hewan yang diproduksi.

Beberapa kasus yang berkaitan dengan kesmavet yang mempengaruhi keamanan dan kehalalan pangan ini adalah: (a) pengawetan daging dan pembuatan bakso dengan menggunakan boraks, (b) pengawetan daging dengan formalin agar dapat tahan lama disimpan, (c) daging ayam tiren (ayam bangkai) yang direndam formalin untuk menghindari aroma bangkai, (d) penggunaan ikan sapu-sapu yang mampu hidup di daerah tercemar logam berat untuk campuran bakso, dan (e) menjual daging babi hutan yang dicampur dengan daging sapi.

Tindakan-tindakan seperti ini melanggar peraturan perundangan yaitu UU No 7/1996 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Kesehatan No.722/1988 yang dituangkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI-01-0222-1985). Pihak Direktorat Jenderal Peternakan mengatur masalah keamanan pangan dengan Program ASUH (Aman-Utuh-Sehat-Halal). Pelanggaran terhadap aturan yang diterbitkan pemerintah dapat dikenakan sanksi hukum.

Dampak negatif mengkonsumsi pangan asal ternak dapat berasal dari ternaknya, proses penanganannya dan bahan pengawet serta zat aditif yang ditambahkan ke bahan pangan asal ternak tersebut. Efek tersebut dapat dirasakan langsung sesaat setelah mengkonsumsi tetapi dapat juga secara tidak langsung karena membutuhkan waktu hingga kandungan racun pada tubuh konsumen mengakumulasi sampai ambang batas yang membahayakan.

Permasalahan yang dihadapi tidak jauh dengan yang dihadapi dalam permasalahan kesehatan hewan. Sejak diberlakukannya Otda banyak institusi-institusi yang menangani masalah ini semakin melemah fungsinya. Dengan kondisi yang demikian kecenderungan yang terjadi program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat veteriner makin terabaikan. Padahal di masa depan masalah ini semakin komplek dan konsumen makin menuntut kualitas pangan yang baik.

Oleh karena itu revitalisasi peternakan haruslah memberdayakan kelembagaan-kelembagaan peternakan termasuk perangkat peraturan dan

perundang-undangan baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Upaya tersebut harus pula diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM khususnya sebagai tenaga medis, paramedis. Keberadaan dan keberdayaan Dinas Peternakan yang mempunyai otoritas sesuai dengan tugas dan fungsinya perlu ditingkatkan sehingga masyarakat konsumen dan produsen tidak dirugikan.

Indonesia telah memiliki banyak perangkat peraturan yang berkaitan dengan bagaimana memproduksi bahan pangan yang berkualitas diantaranya adalah UU No 6 tahun 1967 tentang ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan. UU tersebut didukung oleh PP dan peraturan lain hingga ketingkat program seperti adanya Program ASUH (Aman-Utuh-Sehat-Halal) yang dikeluarkan oleh pihak Direktorat Jenderal Peternakan.

Aman maksudnya, bahwa hewan atau unggas tidak mengandung penyakit dan mengganggu kesehatan manusia. **Sehat** artinya hewan tersebut memiliki zat-zat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. **Utuh** artinya, tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain. **Halal** artinya hewan dan unggas tersebut dipotong dan ditangani berdasarkan syariat Islam.

Untuk mengawasi perbuatan yang melanggar aturan tersebut ada tiga lembaga yang berfungsi untuk itu, yaitu Badan Karantina Pertanian dengan perangkatnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan perangkatnya, dan Direktorat Jenderal Peternakan dan perangkatnya. Namun demikian dituntut juga peran konsumen agar kritis dalam menuntut kualitas pangan, namun hal ini biasanya terkendala bagi masyarakat berpendapatan rendah. Karena itu keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia perlu ditingkatkan.

STRATEGI KEBIJAKAN

Strategi Pengembangan Industri Pakan Nasional

Untuk industri pakan paling tidak ada dua strategi yang dapat dilakukan. *Pertama*, mengembangkan industri pakan ayam ras yang berbasis bahan baku domestik dengan tujuan meningkatkan daya saing produk unggas nasional. Upaya yang dapat dilakukan adalah: (a) mengembangkan daerah produksi jagung dengan sistem distribusi yang efisien dan sistem penyimpanan modern (silo), (b) mengembangkan industri tepung ikan pada sentra produksi perikanan nasional, dan (c) mendorong pihak industri pakan melakukan penelitian dan pengembangan untuk menggunakan bahan baku lokal.

Kedua, mengembangkan industri pakan ruminansia berbasis bahan baku lokal dengan tujuan memicu pertumbuhan produksi daging domestik dan meningkatkan pendapatan peternak. Upaya yang dilakukan adalah: (a)

memudahkan perizinan pengembangan industri pakan ruminansia, (b) memberikan fasilitas kredit investasi industri pakan ruminansia, (c) meringankan biaya impor komponen alat dan mesin industri pakan ruminansia, (d) di daerah investor belum tertarik membangun industri pakan ruminansia, melakukan kerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang telah dilakukan beberapa BPTP untuk menghasilkan “*complete feed*” menggunakan bahan baku dari hijauan, limbah pertanian, limbah industri setempat.

Strategi Pengembangan Sistem Pembibitan Ternak Sapi Potong

Ada empat strategi pengembangan sistem pembibitan sapi potong yang diharapkan mampu meningkatkan produksi daging dan pendapatan peternak sapi potong. *Pertama*, mempertahankan keberadaan plasma nutfah sapi lokal, dengan tujuan untuk menjaga keaslian dan mengembangbiakan bibit sapi lokal. Upaya yang dilakukan adalah: (a) mempertahankan daerah-daerah tertentu sebagai wilayah pengembangan sapi lokal, (b) meningkatkan peran Balai Inseminasi Buatan (BIB) Pusat pada BIB Daerah dan BPTU di wilayah pengembangan sapi lokal, (c) melakukan pendataan performans sapi lokal secara kontinu dan mendeskripsikan karakteristik masing-masing sapi lokal, (d) melakukan penelitian aspek pakan sapi lokal yang respon terhadap penambahan berat badan, (e) melarang ekspor sapi bibit lokal.

Kedua, meningkatkan kinerja usaha pembibitan pemerintah, dengan tujuan mempertahankan keberadaan sapi lokal sebagai sumber sapi bibit dan sapi bakalan pada wilayah kerjanya. Upaya yang dilakukan adalah: (a) memfungsikan BPTU mengembangbiakkan sapi sapi lokal, (b) menghasilkan sapi pejantan dan induk sapi lokal berkualitas, (c) menyebarkan induk dan pejantan sapi lokal dari BPTU kepada masyarakat melalui Dinas Peternakan setempat, dan (d) mengevaluasi kemampuan BPTU yang dinilai dari produksi pedet dan sapi bibit, serta pengembangannya di masyarakat.

Ketiga, mendorong peningkatan populasi dan mutu genetik sapi dengan tujuan meningkatkan populasi dan produktivitas sapi potong serta pendapatan peternak. Upaya yang dilakukan adalah: (a) menggunakan dana APBN/APBD untuk membeli sapi pejantan lokal untuk disebar di masyarakat, (b) tidak mengizinkan ekspor sapi bibit, (c) menggunakan dana APBN/APBD untuk membeli sapi potong betina produktif yang akan dipotong di RPH dan dikembangkan sebagai sapi bibit di masyarakat, (d) memasukkan sapi bakalan dan daging impor untuk memenuhi permintaan domestik dalam waktu tertentu.

Keempat, mendorong pengembangan Inseminasi Buatan (IB) Mandiri dengan tujuan meningkatkan produktivitas ternak sapi potong dan pendapatan peternak. Upaya yang dilakukan: (a) mendorong BIB Lembang dan Singosari serta BIB Daerah untuk memproduksi semen beku jenis sapi pejantan berkualitas yang disenangi masyarakat (Limosin dan Simental), (b) meningkatkan kuantitas

dan kualitas inseminator dan Asisten Teknik Reproduksi dengan melibatkan tenaga ahli baik yang berada di Pusat maupun daerah seperti BPTP, (c) membangun jaringan sistem informasi pelaporan kegiatan IB yang didukung fasilitas kendaraan, Pos IB dan perlengkapan IB, (d) membina peternak peserta dan calon peserta pengguna teknologi IB mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan IB dan manfaat menggunakan IB, dan (e) melakukan evaluasi hasil kegiatan IB.

Strategi Pengembangan Sistem Pembibitan Ternak Ayam Ras

Karena pembibitan ayam ras masih tergantung pada produk impor maka dalam jangka pendek strategi yang dilakukan adalah meningkatkan nilai tambah industri pembibitan unggas di dalam negeri. Dengan strategi itu tujuan yang diharapkan adalah meningkatkan nilai tambah industri pembibitan nasional dan menghindari masuknya penyakit dari luar negeri langsung ke peternak, jika mengimpor telur tetas FS.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut adalah: (a) mengutamakan perijinan impor *Grand Parent Stock* daripada *Parent Stock* sehingga terjadi peningkatan nilai tambah dan menghindari impor penyakit dari bibit yang diimpor dan (b) mengembangkan *Parent Stock* pada daerah-daerah yang beriklim sesuai dengan wilayah pemasaran *Final Stock* (desentralisasi pembibitan).

Strategi Pengendalian dan Pencegahan Wabah Penyakit Ternak

Untuk mengendalikan dan mencegah mewabahnya penyakit menular paling tidak diperlukan tiga strategi. *Pertama*, bagaimana membangun dan memberdayakan jaringan kerja pengendalian penyakit hewan/ternak menular dengan tujuan untuk menghindari kerugian usaha peternakan baik secara langsung maupun tidak langsung; menghindari penurunan produksi; dan meningkatkan kualitas ketahanan pangan.

Upaya yang dilakukan adalah: (a) memberdayakan jaringan kerja pengendalian dan pencegahan penyakit hewan/ternak menular lintas departemen (Lampiran 1) di berbagai level yang didukung perangkat peraturan, (b) memperkuat tenaga veterinerian dan paraveterinerian pada semua lini jaringan kerja, (c) memperkuat fasilitas laboratorium dan sarana pendukung pada semua lini jaringan kerja melalui pengadaan tenaga baru dan pelatihan teknis, dan (d) menyiapkan SOP (*Standard Operational Practice*) untuk mencegah wabah penyakit ternak/hewan menular baik yang sudah pernah terjadi kasus maupun belum.

Kedua, membangun dan memberdayakan jaringan kerja karantina ternak/hewan Nasional dengan tujuan untuk menghindari masuknya penyakit

ternak/hewan dari luar negeri dan mencegah penyebaran penyakit ternak/hewan menular antar daerah. Upaya yang dilakukan adalah: (a) memberdayakan jaringan kerja karantina ternak/hewan nasional, (b) memperkuat tenaga veterinarian dan paraveterinarian pada semua lini jaringan kerja, (c) memperkuat fasilitas laboratorium dan sarana pendukung pada semua lini jaringan kerja, dan (d) menyiapkan SOP untuk mencegah wabah penyakit ternak/hewan menular baik yang sudah pernah terjadi kasus maupun penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi kasus.

Ketiga, membangun sistem sosialisasi mencegah dan menghindari dampak penyakit ternak/hewan menular ke masyarakat luas dengan tujuan untuk meredam keresahan masyarakat dampak penyebaran penyakit dan penularannya pada manusia dan menghindari konsumsi masyarakat terhadap produk peternakan. Upaya yang dilakukan adalah: (a) menciptakan *vidio/poster/leaflet instructional* pencegahan berjangkitnya penyakit ternak/hewan menular; menghindari dampak penyakit ternak/hewan menular kepada manusia; identifikasi produk ternak yang berasal dari hewan yang terjangkit penyakit menular dan menangani produk hasil ternak untuk menghindari penularan melalui produk yang dikonsumsi, (b) mensosialisasikan semua instruksi melalui media televisi, radio, pasar swalayan, pasar tradisional pada saat ada kasus, (c) mensosialisasikan tugas dan fungsi laboratorium keswan yang berada pada instansi terkait kepada konsumen, produsen, pedagang, distributor, importir dan eksportir produk ternak, dan (d) mensosialisasikan tugas dan fungsi laboratorium keswan yang berada pada instansi terkait kepada pimpinan pemerintahan sejak dari Lurah/Kepala Desa hingga Gubernur.

Strategi Pengendalian Keamanan Produk Pangan asal Ternak

Ada dua strategi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan keamanan produk pangan asal ternak. *Pertama*, membangun dan memberdayakan jaringan kerja pengendalian keamanan pangan asal ternak/hewan dengan tujuan menghindari kerugian peternak akibat menurunnya permintaan produk peternakan; meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk peternakan; dan meningkatkan kualitas ketahanan pangan nasional. Upaya yang dilakukan adalah: (a) membangun jaringan kerja pengendalian keamanan pangan asal ternak lintas institusi (Lampiran 2) di berbagai level yang didukung perangkat peraturan, (b) memperkuat tenaga veterinarian dan paraveterinarian pada semua lini jaringan kerja, (c) memperkuat fasilitas laboratorium dan sarana pendukung pada semua lini jaringan kerja, dan (d) melakukan monitoring produk ternak/hewan secara reguler dan acak pada RPH/TPH/RPU, pasar tradisional, swalayan, *meatshop*, pedagang bahan pangan keliling, pedagang bakso/rumah makan/restoran, importir/ekportir/distributor.

Kedua, mensosialisasi keamanan pangan asal ternak/hewan dengan tujuan membina konsumen selektif dalam memilih produk pangan yang aman. Upaya

yang dilakukan adalah: (a) menciptakan *video/poster/leaflet instructional* untuk menghindari dampak penyakit ternak/hewan menular kepada manusia; identifikasi produk ternak yang berasal dari hewan yang terjangkit penyakit menular dan menangani produk hasil ternak untuk menghindari penularan melalui produk yang dikonsumsi, (b) mensosialisasikan semua instruksi melalui media internet, televisi, radio, pasar swalayan, pasar tradisional saat dibutuhkan konsumen, (c) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan jaringan Posyandu melakukan sosialisasi Program Peduli ASUH kepada masyarakat luas, dan (d) mensosialisasikan tugas dan fungsi laboratorium Kesmavet yang berada pada instansi terkait kepada konsumen, produsen, pedagang, dan jajaran Pemda dari Lurah/Kades, Camat, Bupati/Walikota dan Gubernur.

PENUTUP

Agar pembangunan subsektor peternakan mampu memicu pertumbuhan PDB peternakan, mampu meningkatkan kesempatan kerja dan memenuhi bahan pangan asal ternak yang berkualitas dan relatif murah maka jenis ternak yang diprioritaskan untuk dikembangkan adalah ternak sapi potong, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Namun demikian jenis ternak lain tetap dikembangkan namun bukan merupakan prioritas nasional. Lokasi pengembangan kedua jenis ternak itu juga dikhususkan pada daerah-daerah yang memiliki sumberdaya pakan dan pasar yang potensial. Daerah ini dapat merupakan daerah yang merupakan sentra produksi saat ini dan daerah baru yang potensial dikembangkan.

Strategi yang dilakukan tidak hanya melibatkan instansi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, tapi juga lingkup subsektor lain dalam Departemen Pertanian, lingkup luar Deptan seperti Departemen Kesehatan, dan Departemen Dalam Negeri. Upaya ini juga harus melibatkan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat peternak dan masyarakat pada umumnya.

Pemikiran tentang upaya meningkatkan pertumbuhan subsektor peternakan ini dapat juga diacu untuk hal yang sama pada Dinas Peternakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Hal yang perlu diperhatikan adalah diupayakan penyusunan strategi ini hendaknya dikonsultasikan dengan stakeholder sejak dari hulu sampai ke hilir penyelenggara agribisnis peternakan beserta sistem pendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 2004. Laporan Tahunan 2003. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Peternakan, Medan.

Bank Indonesia. Data Statistik. <http://www.bi.go.id/web/id/Data+Statistik/>

Bappenas. 2004. Model Pertumbuhan Sektor Pertanian untuk Penyusunan Strategi Pembangunan Pertanian. Direktorat Pertanian dan Pangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

BPS. 2004a. Sensus Pertanian 2003: Angka Provinsi Hasil Pendaftaran Rumah Tangga (Angka Sementara). Badan Pusat Statistik- Jakarta, Indonesia.

BPS. 2003. Pendapatan Nasional Indonesia 1999-2002. Badan Pusat Statistik-Jakarta, Indonesia.

BPS. 2004. Pendapatan Nasional Indonesia 2000-2003. Badan Pusat Statistik-Jakarta, Indonesia.

BPS. 2005. Pendapatan Nasional Indonesia 2001-2004. Badan Pusat Statistik-Jakarta, Indonesia.

BPS. 2005a. Sensus Pertanian 2003: Analisis Rumah Tangga Usaha Peternakan. Badan Pusat Statistik-Jakarta, Indonesia.

BPS. 2006. Pendapatan Nasional Indonesia 2002-2005. Badan Pusat Statistik-Jakarta, Indonesia.

Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan. 2004. Statistik Peternakan 2003. Ditjen Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian, Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan. 2005. Statistik Peternakan 2004. Ditjen Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian, Jakarta.

Djulin, A., N. Syafaat dan F. Kasryno. 2003. Perkembangan Sistem Usahatani Jagung. Dalam Ekonomi Jagung Indonesia, Penyunting: F. Kasryno, E. Pasandaran dan A.M. Fagi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.

Elisabeth, J. dan S.P. Ginting. 2003. Pemanfaatan Hasil Samping Industri Kelapa Sawit sebagai Bahan Pakan ternak Sapi Potong. Prosiding Lokakarya Nasional "Sistem Integrasi Kelapa sawit-Sapi". Departemen Pertanian, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan PT. Agriconal, Bengkulu.

Hadi, P.U. dan N. Ilham. 2002. Problem dan Prospek Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi Potong di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 21 (4): 148-157.

Ilham, N. 1995. Strategi Pengembangan Ternak Ruminansia di Indoensia: Ditinjau dari Potensi Sumberdaya Pakan dan Lahan. *FAE*, 13 (2): 33-43.

Karo-Karo, T. 2005. Prospek Bisnis Pelepah/Daun Kelapa Sawit dengan Pemaanfaatan Teknologi Tepat Guna. Cikal, Universitas Sumatera Utara, Medan.

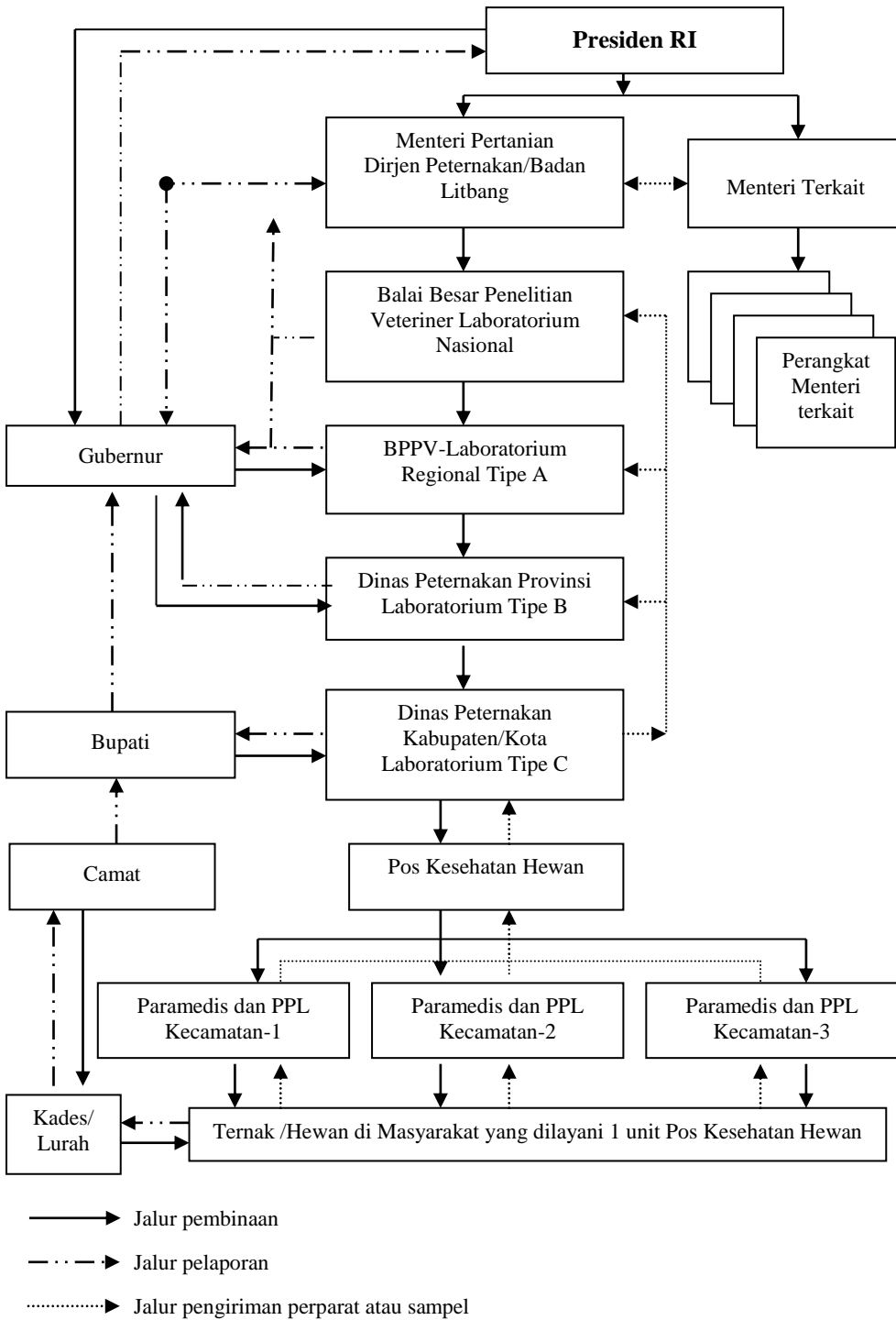
Lipsey, R.G., P.N. Courant, D.D. Purvis, and P.O. Steiner. 1993. Economics. Alih Bahasa: A. Jaka Wasana, Kirbrandoko, dan Budijanto. Binarupa Aksara, Jakarta.

Poultry Indonesia. 2005. Ada Peningkatan 5%. *Poultry Indonesia*, Edisi April 2005, Jakarta.

Poultry Indonesia. 2005b. Tak Pasti karena AI. *Poultry Indonesia*, Edisi April 2005, Jakarta.

- Poultry Indonesia.2005a. Meneropong Broiler 2010. *Poultry Indonesia*, Edisi April 2005, Jakarta.
- Priyarsono, D.S., A. Daryanto dan L. Herliana. 2005. Dapatkah Pertanian Menjadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia? Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi. *Agro-Ekonomika*, 35 (1): 37-47.
- Simatupang, P. 2003. Daya Saing dan Efisiensi Usahatani Jagung Hibrida di Indonesia. *Dalam* Ekonomi Jagung Indonesia, F. Kasryno, E. Pasandaran dan A.M. Fagi (Eds.). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Tangendjaja, B., Y. Yusdja dan N. Ilham. 2003. Analisis Ekonomi Permintaan Jagung untuk Pakan. *Dalam* Ekonomi Jagung Indonesia. F. Kasryno, E. Pasandaran dan A.M. Fagi (Eds.). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Yusdja, Y., E. Basuno, I W. Rusastra, M. Ariani, Suharsono, dan P. Simatupang. 2004. Penelitian Dampak Sosial Ekonomi Krisis Avian Influenza terhadap Sistem Produksi Unggas di Indonesia dengan Fokus Utama Peternak Kecil Mandiri. Kerjasama Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian Bogor dengan Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen Bina Produksi Peternakan Jakarta dan FAO-RAP Bangkok-TCP/RAS/3010.
- Yusdja, Y., R. Sayuti, W.K. Sejati, I.S. Anugrah, I. Sadikin, dan B. Winarso. 2005. Pengembangan Model Kelembagaan Agribisnis Unggas Tradisional (Ayam Buras, Itik, dan Puyuh). Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.

Lampiran 1. Jaringan Kerja Laboratorium Kesehatan Hewan Nasional



Lampiran 2. Jaringan Kerja Pengendalian Keamanan Pangan Asal Ternak/Hewan Nasional

